

Peran DPRD Dalam Penyusunan APBD

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id

HP: 081 328 488 444

APBD untuk Pembangunan Daerah



Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH

1. Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self-financing” ke “external control”?)
2. PDRB per kapita meningkat, tetapi *horizontal imbalance* juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis)
3. Peningkatan *tax effort* diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya dengan investasi)
4. Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp -43 T), belanja kurang efektif (Depkeu, 2009)
5. Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.

HIPOTETIS

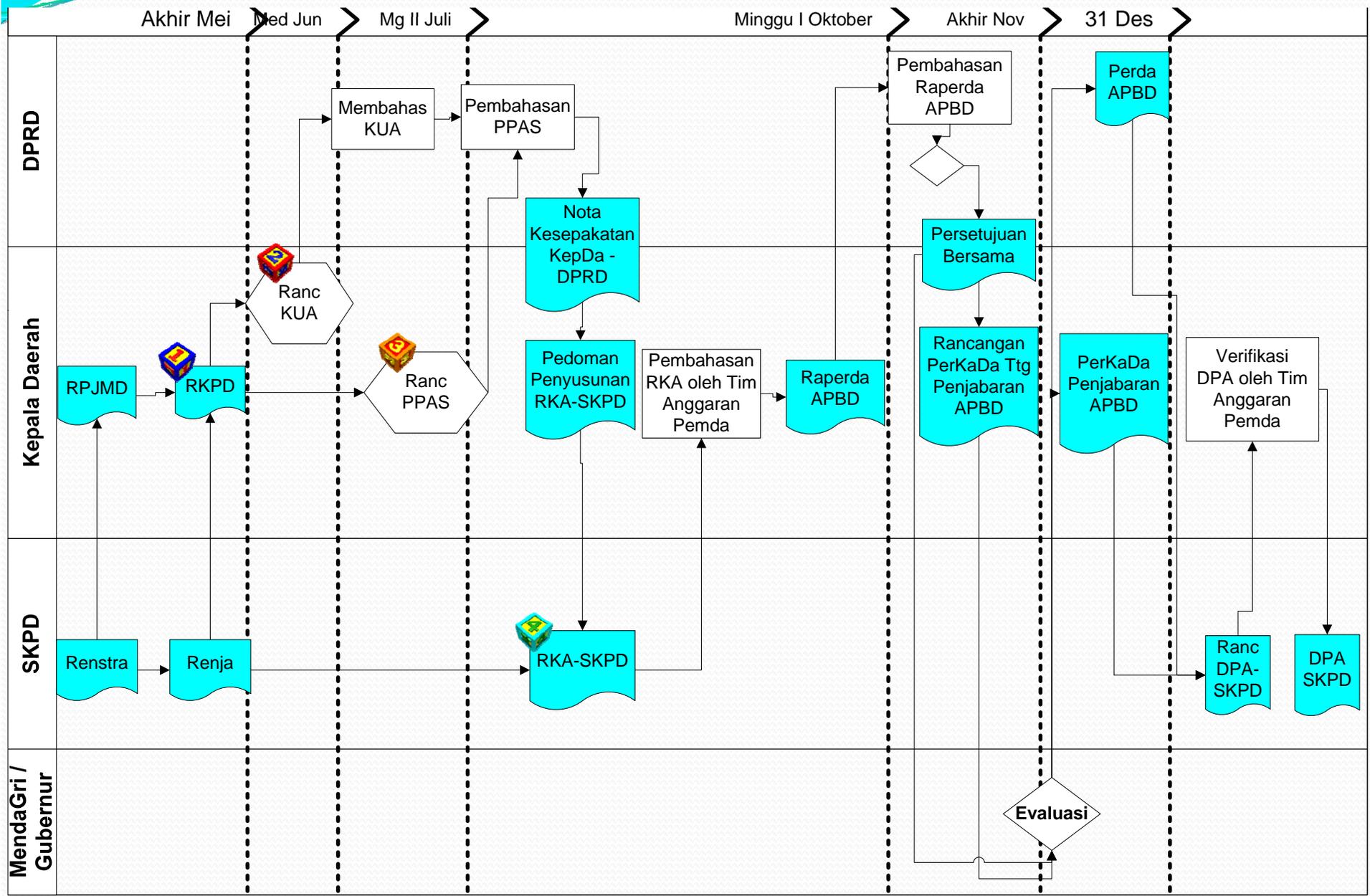
Analisis Kepentingan Stakeholders

- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud)
- **DPRD**
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.

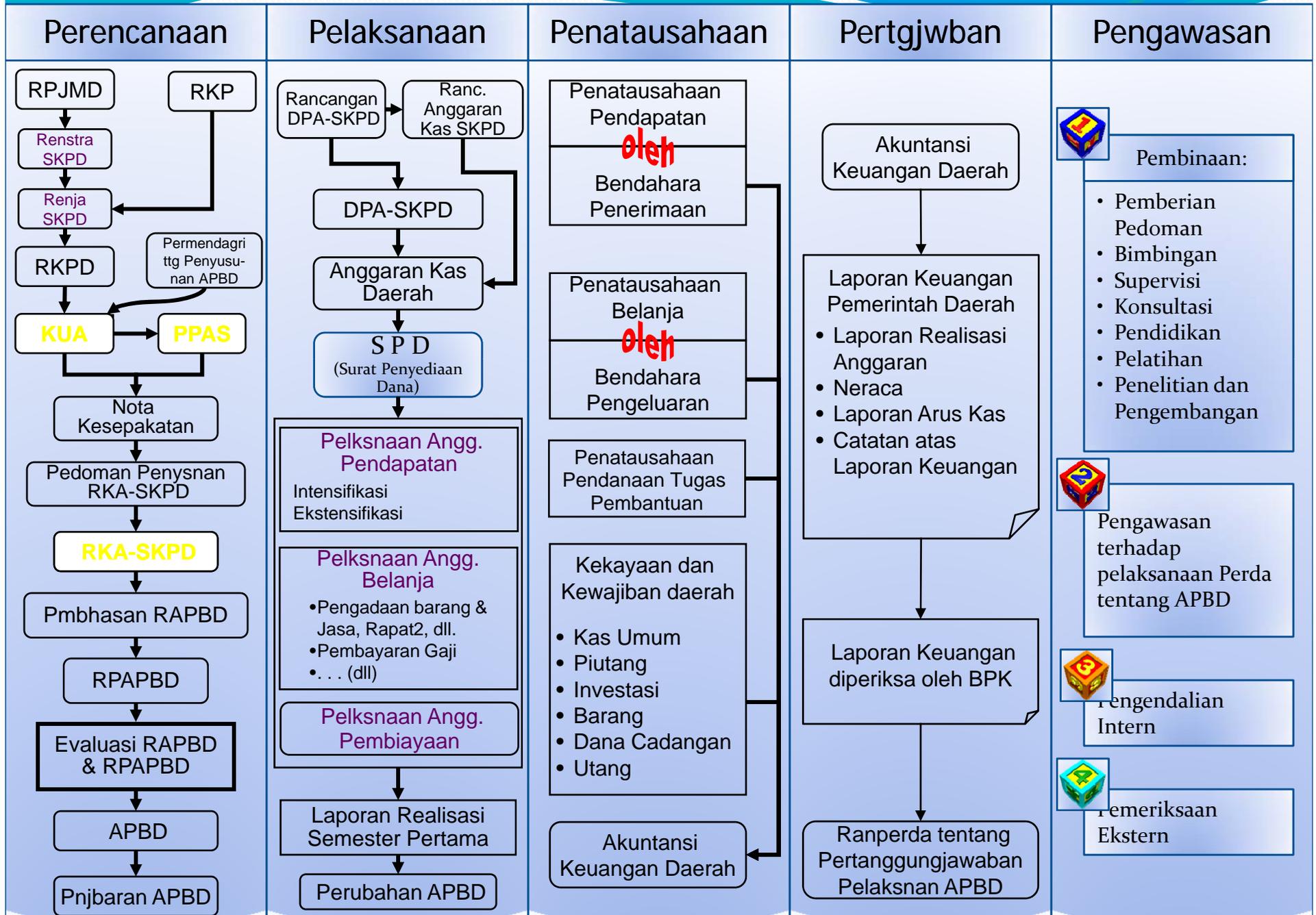


Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

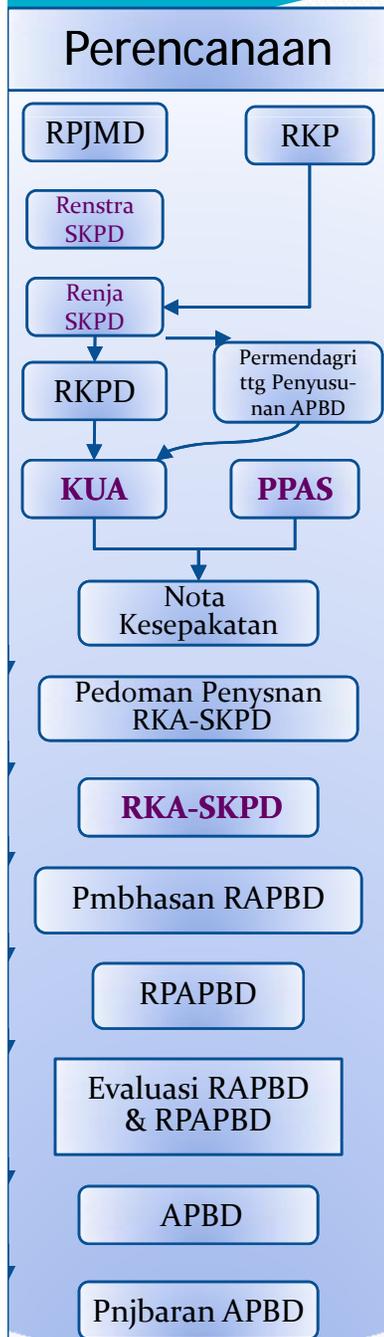
JADWAL PENYUSUNAN APBD



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

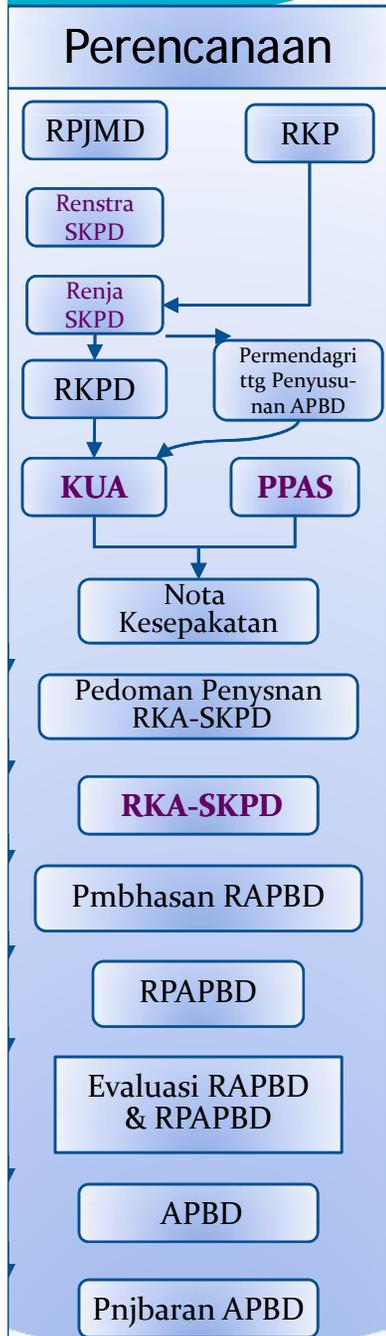


KEBIJAKAN UMUM APBD



- KUA memuat:
 - **target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program** yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
 - **proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan**
 - **asumsi yang mendasarinya target dan proyeksi**
- Pembahasan KUA dilakukan oleh **TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD** dalam **pembicaraan pendahuluan RAPBD** tahun anggaran berikutnya.
- Disepakati dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

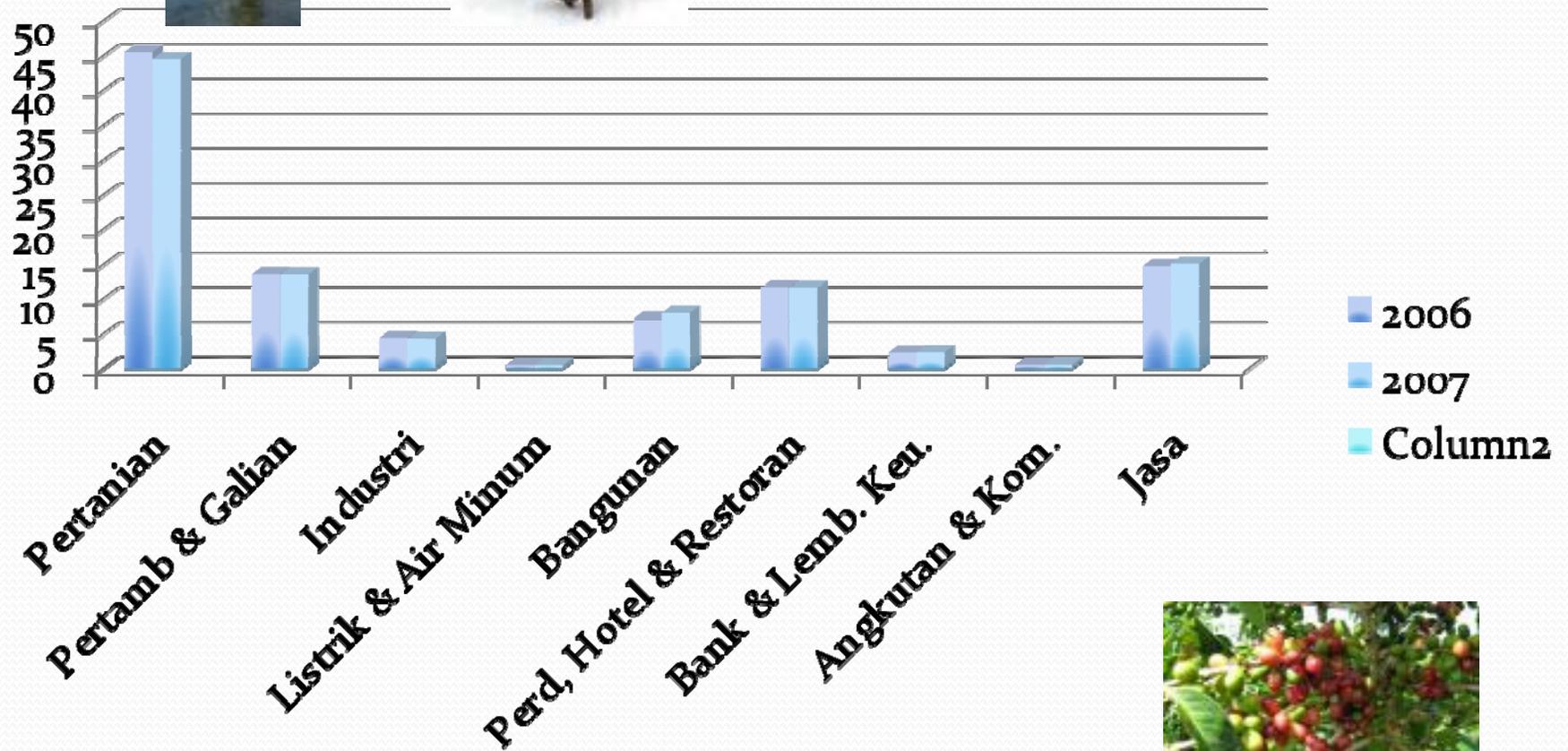


- PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara :
 - **Rancangan program prioritas** dan **patokan batas maksimal anggaran** yang diberikan kepada SKPD
 - Acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- Disusun dengan tahapan sbb:
 - menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:
 - Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah
 - Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

APBD Kab Trenggalek 2009 (Rp juta)

Uraian	Anggaran	% dari APBD
PENDAPATAN	656,593	95,28
Pendapatan Asli Daerah	34,254	4,97
Hasil Pajak Daerah	5,963	0,87
Hasil Retribusi Daerah	8,709	1,26
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,558	0,23
Lain-lain PAD yang Sah	18,024	2,62
Dana Perimbangan	572,998	83,15
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	38,101	5,53
Dana Alokasi Umum	465,955	67,62
Dana Alokasi Khusus	68,943	10,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	49,342	7,16
BELANJA	689,093	100,00
Belanja Tidak Langsung	442,593	62,23
Belanja Pegawai	367,231	53,29
Bantuan Sosial	15,175	2,20
Bantuan Pemerintahan Desa	41,415	6,01
Belanja Tidak Terduga	10,527	1,53
Belanja Langsung	246,500	35,77
Belanja Pegawai	22,626	3,28
Belanja Barang dan Jasa	100,253	14,55
Belanja Modal	123,622	17,94

Kontributor PDRB Trenggalek



Catatan ttg APBD & Pembangunan Trenggalek

1. Pengesahan terlambat: APBD TA 2009 disahkan tgl 27 Maret 2009.
2. Daya serap rendah; TA 2008, hingga November 2008 baru terserap 52 persen.
3. Anggaran sektor pendidikan: 40,9 persen (TA.2007).
4. APK (Angka Partisipasi Kasar) sekolah lanjutan meningkat (dari 54,69% menjadi 62,47⁰%); tetapi cakupan layanan kesehatan masih rendah (31,35⁰%).
5. Belanja tersedot gaji PNS; hanya ada 3 proyek *multiyears* (Rp 20 M): tembusan Jalan Raya Soetran, Jalan Prigi - Gemaharjo dan Stadion Kelutan.

Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. *Mark-up* (penggelembungan) anggaran
4. Alokasi anggaran kembar
5. Anggaran tanpa rincian
6. Menghilangkan pos anggaran
7. Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang *cash*.

Sumber: ICW, 2007

Kedudukan Keuangan DPRD

(PP No.21/2007)

- Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi, t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan.
- TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.
- BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi.
- Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?

Temuan BPK di Trenggalek 2008

1. Penyetoran PPJ oleh PLN tidak sesuai dokumen kerjasama (110,6 jt)
2. Bantuan sosial (247 jt Disnaker; 3,5 M masjid Jami') tidak tepat, tidak didukung bukti
3. Belanja peg / honor PNS tidak tepat (73,5 jt)
4. Laporan fisik & keuangan ADD (13,7 M) tidak didukung bukti
5. BOP pimpinan & anggota DPRD (16,8 jt) tidak didukung bukti
6. Penyertaan modal di UPUD (1 M) tidak tepat
7. Belanja modal Diskelhubpar tidak tepat
8. Pencatatan aset di SKPD tidak tepat.

PENUTUP

Fungsi pokok DPRD dalam penyusunan APBD adalah pada perencanaan, penentuan prioritas, dan pengawasan.

Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.

SEKIAN